

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegagalan pemerintah Sri Lanka dalam pengelolaan BRI diakibatkan oleh stabilitas perpolitikan domestik yang buruk. Kondisi tersebut membuat Sri Lanka menjadi negara yang gagal. Semua konsep yang dipakai dalam penelitian ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Sri Lanka sebagai *host country* tidak mampu dalam melakukan perencanaan dan eksekusi yang matang sehingga jauh dari kata sukses yaitu menghasilkan keuntungan perkembangan ekonomi dan infrastruktur Sri Lanka.

Kesimpulan ini sesuai dengan konsep *good governance* melalui enam indikator sebagai analisis di antaranya responsif, akuntabilitas, supremasi hukum, transparansi, inklusif dan *openness to change*, efektif dan efisien. Dalam indikator responsif, pemerintah Sri Lanka gagal merespons protes lokal terkait dampak sosial dan ekonomi. Pembangunan bandara, misalnya, tidak didasarkan pada kebutuhan riil transportasi udara, menyebabkan minimnya aktivitas operasional meskipun biaya pembangunannya sangat tinggi. Dalam akuntabilitas, pemerintah gagal dalam tanggung jawab kepada publik atas kebijakan, proses dan hasil pembangunan infrastruktur khususnya dalam pembangunan *Colombo Port City* dan Pelabuhan Hambantota yang dalam kebijakannya masih menyimpang, dengan maksud masih mementingkan aspek ekonomi dan politik aspek lainnya masih

diabaikan. Hal ini memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil. Pada penegakan hukum, proyek BRI Sri Lanka menghadapi kritik karena proses kontrak yang dianggap tidak transparan dan berpotensi melanggar regulasi terkait tata kelola pembangunan, mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap hukum. Dalam transparansi pemerintah Sri Lanka tidak transparan memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai rencana kesepakatan dengan China, termasuk risiko finansial proyek yang menimbulkan spekulasi dan ketidakpuasan publik terhadap proyek tersebut. Dalam inklusivitas dan terbuka terhadap perubahan, pemerintah Sri Lanka kurangnya pelibatan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka mencerminkan pendekatan yang tidak inklusif. Selain itu, pemerintah Sri Lanka juga menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima dan beradaptasi dengan masukan atau kritik, terutama dalam pengelolaan proyek BRI, yang memperburuk berbagai masalah finansial dan sosial yang timbul. Dalam efektivitas dan efisiensi pemerintah Sri Lanka melalui BRI tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding, yang seharusnya dapat memberikan dampak efisiensi untuk negara, proyek ini justru membebani negara dengan utang yang besar tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana pemikiran konsep governance bahwa ketidakstabilan Sri Lanka dalam mengelola BRI membuat Sri Lanka kehilangan kedaulatannya sebagai negara, dan ini membawa Sri Lanka pada posisi *failed state*. Sesuai dengan pemikiran konsep *failed state* terdapat 4 indikator yaitu runtuhnya hukum,

ketertiban, dan otoritas pemerintahan pusat, kehadiran lembaga - lembaga ekstraktif, eksploitasi ekonomi, serta konflik dan ketidakstabilan politik. Ketidakmampuan pemerintah pusat Sri Lanka dalam mempertahankan hukum, ketertiban, dan otoritas, yang diperparah oleh prioritas terhadap kepentingan elit politik, telah menciptakan ketidakpuasan publik yang meluas. Protes besar-besaran pada tahun 2022, yang memaksa Presiden Gotabaya Rajapaksa mundur, mencerminkan hilangnya legitimasi pemerintah dalam mengelola tantangan domestik dan proyek infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Hambantota, yang akhirnya jatuh ke tangan China akibat kegagalan memenuhi kewajiban utang. Keberadaan lembaga ekstraktif semakin memperparah ketimpangan ekonomi dan sosial, dengan investasi BRI yang seharusnya mendukung pembangunan inklusif justru dimanfaatkan oleh elit politik untuk kepentingan pribadi, sementara sektor pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan mengalami penurunan alokasi anggaran. Eksploitasi ekonomi dari proyek BRI lebih banyak menguntungkan China sebagai investor utama, dengan kontrol atas infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Hambantota berpindah ke tangan asing dan beban utang negara terus meningkat hingga rasio utang terhadap PDB mencapai 101% pada tahun 2022, yang menempatkan kedaulatan Sri Lanka dalam risiko. Ketidakstabilan politik yang ditandai oleh konflik internal, ketegangan etnis, korupsi pejabat tinggi, dan kebijakan yang tidak konsisten semakin memperburuk tata kelola pemerintahan, menghambat keberhasilan proyek BRI, dan menciptakan lingkungan yang tidak stabil, sehingga beberapa proyek infrastruktur harus diambil alih oleh China, yang pada akhirnya

melemahkan daya saing ekonomi Sri Lanka dan kepercayaan investor internasional terhadap negara tersebut.

Penulis berpendapat bahwa, Keberhasilan investasi atau proyek besar seperti Belt and Road Initiative (BRI) sepenuhnya bergantung pada kapasitas pemerintah penerima dalam merencanakan, mengelola, dan mengeksekusi proyek tersebut secara efektif. Ketika pemerintah gagal memenuhi tanggung jawab ini, investasi yang seharusnya menjadi katalis pembangunan justru berbalik menjadi beban yang memberatkan negara, baik secara finansial maupun sosial. Seperti yang terjadi di Sri Lanka, kelemahan dalam tata kelola, kurangnya transparansi, dan prioritas terhadap kepentingan elit politik telah mengubah potensi pembangunan menjadi krisis yang mendalam, merugikan masa depan negara. Alih-alih memperkuat kedaulatan dan perekonomian, kegagalan ini menjerumuskan Sri Lanka ke dalam kondisi failed state, di mana ketidakmampuan pemerintah untuk mempertahankan hukum, ketertiban, dan kepercayaan publik menjadi pengingat bahwa investasi besar tanpa pemerintahan yang kompeten hanya akan membawa kehancuran.

4.2. Saran Penelitian

Penelitian ini telah memberikan jawaban atas rumusan masalah terkait yaitu Mengapa Sri Lanka gagal dalam mengelola proyek infrastruktur pada Belt and Road Initiative. Dengan menggunakan analisis konsep *good governance* dan *failed state* yang menjadi pisau analisis untuk melihat ketergantungan Sri Lanka dengan China, kesenjangan krisis tata kelola pemerintahan Sri Lanka dan kualitas

tata kelola pemerintahan dalam mengelola proyek infrastruktur negaranya melalui proyek BRI, yang menjadikan Sri Lanka negara yang gagal sebagai penerima proyek BRI.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pembuat kebijakan, terutama di negara-negara berkembang yang menerima investasi dari negara maju. Kajian ini juga menawarkan perspektif baru dalam menganalisis kualitas tata kelola pemerintahan di Sri Lanka sebagai contoh negara berkembang. Bagi negara-negara lain dengan tantangan serupa, seperti kegagalan dalam tata kelola pemerintahan, pengalaman Sri Lanka dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan untuk penelitian berikutnya menggali lebih dalam mengenai dampak kondisi *failed state* suatu negara dalam hubungan internasional. Analisis tersebut dapat memberi penjelasan lanjutan mengenai kondisi politik-ekonomi suatu negara paska kondisi gagal dalam hubungan internasional.